

Analisis Wacana Kritis Dalam Film Dokumenter “Dirty Vote”

Rahmawati Sukma Lestari^{a,1,*}, Andi Ahriani^{b,2}

^a IAIN Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

^b IAIN Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia

¹ rwati@gmail.com*; ² andiahriani84@gmail.com

* penulis korespondensi

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima: [2025-05-21]

Direvisi: [2025-05-30]

Disetujui: [2025-06-18]

Keywords

Critical Discourse

Analysis

Dirty Vote Film

ABSTRACT

Film is a mass communication medium used as a means of entertainment, information, and also as a tool for conveying social and political messages to the public. Films come in many types, one of which is documentary films, which are based on the documentation of real events. The documentary film *Dirty Vote* represents the political situation in Indonesia during the 2024 General Election. The film *Dirty Vote* shows that various fraudulent practices were carried out by political elites in the 2024 election, ranging from the campaign period to the days leading up to voting day. The research method used in this study is qualitative, employing a literature study approach. This research is analyzed using Norman Fairclough's critical discourse analysis model, which includes analysis of textual dimensions, discourse practices, and sociocultural practices. The results of the critical discourse analysis on this film indicate that there are five major themes of electoral fraud portrayed in the documentary, namely: First, the discourse surrounding President Jokowi's inconsistent statements regarding Gibran's candidacy. Second, the discourse on the creation of new administrative regions in Papua Island aimed at securing a first-round victory. Third, the discourse on maladministration by the President and the non-neutrality of state officials



This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.

1. Pendahuluan

Film merupakan media massa audio visual yang menyajikan berbagai hiburan, alur yang menarik dalam sebuah film akan menambah daya tarik bagi penonton. Film menjadi salah satu media yang banyak diminati, tidak hanya sebagai hiburan namun juga sebagai sarana edukasi bahkan kritik sosial. Daya tarik film tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dalam berkembangnya produksi film di Indonesia, sebagaimana Laporan dari Lembaga Sensor Film (2024), bahwa selama tahun 2024 LSF melakukan penyensoran terhadap 42.331 judul film dan iklan film. Jumlah data tersebut menunjukkan tingginya aktivitas produksi dan distribusi konten di Indonesia, serta memperlihatkan peran LSF dalam mengawasi setiap tayangan yang disiarkan.

Peningkatan ini sejalan dengan tren perfilman yang berkembang pada tahun 2018 jumlah produksi film nasional sebanyak 132 judul dengan 51,2 juta penonton, dan hingga pada saat pandemi Covid-19 produksi film melonjak tajam mencapai 289 judul dengan 19 juta penonton per-tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa produksi perfilman di Indonesia terus mengalami kemajuan dan memberikan inovasi melalui berbagai jenis genre film yang ikut berkembang (BPI, 2024). Kemajuan industri perfilman di Indonesia tidak hanya meliputi inovasi dalam genre nya saja, tetapi juga dalam fungsi film itu sendiri sebagai media komunikasi yang efektif dalam penyampaian pesan.

Dalam era teknologi yang terus berkembang saat ini, adanya film tentu menjadi salah satu sarana yang mudah sebagai alat penyampaian pesan kepada audiens atau penonton (Alfarisie, 2023). Keefektifan film dalam menyampaikan pesan ini tidak hanya terbatas pada hiburan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk isu-isu sosial dan politik yang kompleks. Dalam perspektif komunikasi massa, film diinterpretasikan sebagai pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis, dengan memahami hakikat, fungsi dan efeknya (Alkhajar, 2010). Kemampuan film dalam menyampaikan visual dan naratif yang baik, sehingga menjadikan film mampu untuk merepresentasikan sebuah realitas secara efektif.

Adanya pengaruh film untuk menyampaikan pesan, maka tidak heran jika film sering dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk kalangan elite atau politikus. Kehadiran film dimanfaatkan oleh kalangan elite sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan

politik mereka (Goran, 2021). Baik untuk sekedar meningkatkan citra diri atau bahkan digunakan sebagai alat untuk membentuk cara berfikir masyarakat. Komunikasi politik menjadi alat yang sangat penting dalam proses ini, sebagai jembatan untuk menyampaikan ide, visi dan kebijakan (Fatikh, 2019). Penggunaan film sebagai alat penyampaian pesan politik semakin penting, karena kemampuan film untuk mempengaruhi penonton secara persuasif, salah satunya melalui film dokumenter. Para elit maupun politikus menggunakan film dokumenter sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan suara.

Para elit atau politikus menggunakan berbagai strategi salah satunya melalui film dokumenter untuk mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari masyarakat, terutama pada masa pemilu. Seiring dengan semakin dekatnya momen pemilu, upaya-upaya persuasif oleh para elit politik pun dilakukan secara terus-menerus dan bahkan terkadang melampaui batasan-batasan yang seharusnya. Mereka berusaha dalam menarik simpati masyarakat dengan segala cara yang mungkin dilakukan (Aliya, 2023). Melihat dari situasi ini, film dokumenter menjadi medium bagi para pengkritik sosial untuk menyuarakan kritik, pandangan mereka, serta menyampaikan informasi kepada publik terkait praktik-praktik yang dilakukan oleh para elit politik dalam rangka meraih kemenangan pada Pemilu.

Pada pemilu tahun 2024 ada film dokumenter mengenai politik yang viral, berisi penyampaian pesan serta informasi terkait konflik politik adalah Film "Dirty Vote". Film dokumenter Dirty Vote ini cukup menarik perhatian khalayak dan ramai diperbincangkan diberbagai platform media sosial, seperti di X, Tiktok, Instagram. Film dengan durasi 117 menit yang dipublikasikan melalui akun youtube PSHK Indonesia (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) pada tanggal 11 Februari 2024, tiga hari menjelang hari tenang pemilu 2024, dan sudah ditonton sebanyak 9,7 ribu kali (Youtube @PSHKIndonesia, 2024).

Lebih lanjut, melihat dari waktu penayangan yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu, ini tentu memicu berbagai spekulasi, kontroversi, dan perdebatan di masyarakat (Youtube @PSHKIndonesia, 2024). Tentang apakah orang-orang yang ada dibalik film tersebut benar ingin menjatuhkan salah satu pasangan calon atau hanya berusaha untuk membuka pikiran masyarakat Indonesia terutama yang memiliki hak suara pada pemilihan umum 2024 terkait tentang bagaimana proses demokrasi yang dijalankan oleh

para elit politik selama ini. Pemilihan momen penayangan yang strategis inilah yang banyak menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya motif politis atau justru sebaliknya, murni merupakan bentuk kritik sosial yang bertujuan untuk mengungkapkan kecurangan pemilu, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika elektoral yang sedang berlangsung.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji film dokumenter "Dirty Vote". Penting bagi peneliti untuk menelaah lebih lanjut terkait film Dirty Vote, apakah film ini benar-benar menggambarkan realitas politik yang sebenarnya, atau justru dikonstruksi untuk menggambarkan realitas atas kepentingan suatu pihak. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dalam sebuah berita di (Antaranews.com, 2024) menyebut film ini sebagai "halusinasi" dan menuduh para pemerannya sudah memiliki preferensi politik terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia juga mengkritik perilisan film tersebut yang dilakukan pada masa tenang pemilu, menyebutnya sebagai bentuk kampanye hitam.

Berbanding terbalik dengan sutradara film ini, Dandhy Dwi Laksono, dalam pernyataan tertulisnya, menyatakan bahwa "Dirty Vote" dibuat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Meski banyak pihak menilai film ini sebagai kampanye hitam menjelang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru menyarankan masyarakat untuk menonton film dokumenter tersebut (Antaranews.com, 2024). Lebih lanjut, peneliti juga tertarik untuk mengetahui kenapa film tersebut diunggah pada saat masa tenang pemilu, apakah ada tujuan tertentu di balik waktu penayangannya.

2. Metode

Temuan adegan dari film dokumenter Dirty Vote yang penulis peroleh melalui kanal Youtube PSHK Indonesia, berfokus kepada penyampaian narasi kecurangan yang dikelompokkan dalam 5 adegan yang dipaparkan pada tabel di bawah, sebagai berikut:

1. Analisis Dimensi Teks

a. Wacana Pernyataan Presiden Jokowi yang Tidak Konsisten Terkait Pencalonan Gibran

Jokowi: "Gibran ini belum, feeling ke politiknya belum. Masih senang 100% di dunia usaha." Jokowi: "Pertama, umur. Yang kedua, baru dua tahun jadi walikota. Yang logis ajalah.

Gibran: "Tenang saja pak, saya sudah ada di sini."

Jokowi:

"Yang paling penting, presiden boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak."

Sumber: Film Dirty Vote "telah diolehan oleh penulis", 2025

Analisis teks berdasarkan:

1) Representasi

Representasi kecurangan tergambar pada wacana awal terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2014 Joko Widodo yang tidak konsisten terkait pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Jokowi memberikan gambaran bahwa Gibran belum siap untuk masuk politik, dalam kalimatnya "feeling ke politiknya belum" dan "masih senang 100% di dunia usaha" pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi kepada awak media pada tahun 2018. Pernyataan Jokowi tersebut mengungkapkan bahwa Gibran saat masih senang di dunia usaha dan belum tertarik ke politik. Kemudian, pada tahun 2024 Jokowi muncul dengan pernyataannya mengatakan:

"Yang paling penting, presiden boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak."

Secara tekstual, subjek "presiden" dan pada predikat "boleh" sama-sama diulang sebanyak dua kali. Sehingga membentuk struktur pengulangan atau repetisi, menurut Keraf (1999) bahwa repetisi merupakan pengulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting sebagai penegas pada situasi dan kondisi. Struktur repetisi tersebut bertujuan untuk menekankan pesan utama mengenai ke legal-an presiden untuk berpihak dalam politik.

Beberapa tahun setelahnya yakni tahun 2024, Gibran muncul dengan pernyataan bahwa dirinya siap masuk di dunia politik, dengan menyatakan:

"Tenang saja pak, saya sudah ada di sini"

Secara tekstual kalimat tersebut merupakan klausa tidak lengkap karena hanya memiliki unsur predikat saja. Dialog Gibran memiliki makna kepercayaan diri dan

kesiapannya dalam pencalonan sebagai wakil presiden 2024, serta kalimat tersebut ditujukan kepada rekannya Prabowo Subianto.

2) Relasi

Hubungan relasi yang terbangun antara peran Jokowi dan Gibran terlihat pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Jokowi kepada awak media. Pernyataan yang disampaikan Jokowi kepada awak media terkait keterlibatan Gibran dalam politik menunjukkan bahwa Jokowi memiliki kewenangan dalam menilai kesiapan dari seorang Gibran untuk masuk ke dunia politik. Selain itu juga memperlihatkan adanya representasi kekuasaan dari Jokowi. Lebih lanjut, dilihat dalam teks atau kalimat langsung Jokowi:

“Baru dua tahun jadi walikota”

“Yang paling penting, presiden boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak.”

Merepresentasikan pernyataan yang ambigu, di mana semulanya ia seakan-akan memberi penegasan bahwa pengalaman politik merupakan aset penting bagi seorang yang ingin mencalonkan. Kemudian pada pernyataan Jokowi lainnya, menunjukkan relasi bahwa ada keberpihakan dirinya kepada Gibran. Relasi ini menunjukkan bahwa posisi Jokowi presiden (pada saat itu) memberikan pengaruh atau kekuatan yang sah terhadap tindakan politik yang diambil oleh Gibran.

3) Identitas

Pada tabel 3.1 terdapat teks yang berisi pernyataan Jokowi:

“Gibran ini belum, feeling ke politiknya belum. Masih seneng 100% di dunia usaha.”

“Pertama, umur. Yang kedua, baru dua tahun jadi walikota. Yang logis ajalah.”

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, peneliti memahami bahwa pernyataan Jokowi merupakan bagian dari konstruksi untuk membentuk realitas politik yang dinginkan, merupakan upaya Jokowi untuk menjaga citra politiknya serta megarahkan opini publik. Pada bagian identitas, dapat terlihat pada saat Gibran muncul dengan pernyataannya bahwa dirinya “sudah ada di sini”, menyatakan identitasnya yang baru dari yang sebelumnya dari identitas pengusaha “non-politisi” dan digambarkan sebagai seorang yang belum tertarik masuk ke dunia politik menjadi seorang siap maju ke politik mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

3. Hasil

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam film Dokumenter Dirty Vote memuat berbagai narasi yang mencerminkan kecurangan politik pada Pemilihan Umum 2024 yang dilakukan oleh para elit politik. Dalam analisis wacana kritis model Norman Fairclough terdapat tiga langkah analisis yakni, analisis dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi sosialkultural. Peneliti menganalisis 5 praktik wacana kecurangan yang tergambar dalam film antara lain: Pertama, wacana pernyataan Presiden Jokowi yang tidak konsisten terkait pencalonan Gibran. Kedua, wacana sebaran wilayah baru di Pulau Papua demi meloloskan satu putaran. Ketiga, wacana maladiministrasi oleh Presiden, serta ketidaknetralan pejabat negara. Keempat, wacana ancaman yang ditujukan kepada kepala desa oleh aparat penegak hukum. Kelima, wacana anggaran bansos melonjak setiap musim pemilu diduga untuk politisasi bansos.

Selain itu, motivasi penayangan Film Dirty Vote pada masa tenang Pemilu merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan akan selalu terealisasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan juga akan selalu mempunyai dampak kuasa. Dalam keterkaitannya antara konsep relasi kekuasaan dan pengetahuan yang ada pada Film "Dirty Vote" dapat dilihat bahwa film "Dirty Vote" merupakan representasi dari produk wacana tandingan yang muncul atas praktik penyalahgunaan kekuasaan pada pemilu 2024. Kekuasaan dapat menjadi efektif bukan dikarenakan adanya tekanan dari atas, tetapi karena minimnya keterlibatan dari pihak-pihak yang didominasi. Dilihat dari hubungan ini, penayangan film "Dirty Vote" pada masa tenang pemilu sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan. Di mana masa tenang sesungguhnya merupakan saat di mana berbagai macam wacana politik dihilangkan dari publik, hingga pada masa pencoblosan tiba. Pada masa tenang tersebutlah masyarakat cenderung menjadi pasif. Sehingga film "Dirty Vote" masuk sebagai bentuk anti kekuasaan atau perlawanan dengan upaya untuk membongkar wacana-wacana kecurangan pemilu 2024. Kaitannya dengan disiplin dan pengawasan Michel Foucault, adalah masa tenang pemilu dijadikan sebagai strategi dalam mempengaruhi kesadaran masyarakat. Masa tenang adalah waktu di mana segala bentuk aktivitas politik dalam hal "kampanye" dihentikan. Seperti disampaikan oleh sutrada film, dirinya memanfaatkan momentum masa tenang agar dapat menjadi ruang diskusi bagi masyarakat. Film "Dirty Vote" di sini, berperan dalam menciptakan kontrol atau pengawasan tetapi bukan

dengan kekerasan, namun sebagai pengawas yang mendidik masyarakat berkaitan dengan Pemilihan Umum.

4. Pembahasan

Pada hakikatnya, film merupakan representasi dari realitas yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Melalui medium visual, film mampu menampilkan berbagai persoalan sosial, dinamika interaksi manusia, hingga konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemampuannya dalam menghadirkan realitas secara lebih hidup, film berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan, menggugah kesadaran, serta membentuk perspektif penonton terhadap suatu isu tertentu. Dalam proses penciptaannya, film dapat mengemas gagasan-gagasan penting melalui konsep yang kreatif, baik dari segi alur cerita, teknik sinematografi, komposisi gambar, penggunaan backsound, maupun elemen pendukung lainnya yang berperan besar dalam membangun keterlibatan emosional penonton.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana teori konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dapat diterapkan dalam membaca dan menafsirkan makna yang terkandung dalam film dokumenter *Dirty Vote*. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan wacana Norman Fairclough yang memungkinkan peneliti menelaah teks, praktik produksi, dan konteks sosial yang melingkupi film tersebut. Dengan memadukan teori konstruksi sosial dan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana realitas politik dikonstruksi, direpresentasikan, dan disebarluaskan kepada publik melalui film dokumenter. Oleh karena itu, berikut disajikan kerangka konseptual yang menjadi acuan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian dan memaparkan temuan secara sistematis.

5. Penutup

Film "*Dirty Vote*" dapat dipahami sebagai bentuk wacana tandingan yang hadir sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kehadiran wacana tandingan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui tekanan dari pihak yang dominan, tetapi juga melalui ketidakaktifan, ketidakpedulian, atau minimnya partisipasi dari kelompok yang didominasi. Dalam hubungan seperti ini, penayangan "*Dirty*

"Vote" pada masa tenang pemilu dapat dipahami sebagai tindakan resistensi atau bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuatan politik yang dominan. Masa tenang, yang sejatinya merupakan periode di mana berbagai pesan politik dihapus dari ruang publik menjelang hari pencoblosan, justru menciptakan kondisi di mana masyarakat berada dalam posisi pasif dan tidak mendapatkan alternatif informasi politik.

Dalam konteks tersebut, film "Dirty Vote" hadir sebagai media antitesis terhadap kekuasaan, berupaya membongkar narasi maupun praktik kecurangan dalam Pemilu 2024 yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau oleh publik. Jika dikaitkan dengan konsep disiplin dan pengawasan Michel Foucault, masa tenang pemilu dapat dipahami sebagai strategi yang digunakan untuk membentuk kesadaran politik masyarakat melalui pengendalian aliran informasi. Pada fase ketika seluruh aktivitas kampanye dihentikan, ruang publik menjadi steril dari wacana politik. Namun, menurut penjelasan sutradara, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagai peluang untuk menghadirkan diskusi baru yang lebih kritis di masyarakat. Dengan demikian, film "Dirty Vote" berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang tidak bersifat represif, melainkan edukatif—yakni membantu masyarakat memahami dinamika kekuasaan, potensi kecurangan, serta pentingnya menghadapi Pemilu dengan kesadaran politik yang lebih matang dan kritis.

Daftar Pustaka

- Adella, Vara. (2020). Representasi Komunikasi Politik Dalam Film "Sexy Killers".
SKRIPSI tidak diterbitkan. Medan: Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara.
- Alexander, Pinfan D. dan Redyanto N. (2022). *Konstruksi Sosial dalam Film Pendek Kudapan Spesial Karya Bagas Satrio*, Sebuah Kajian Sosiologi Sastra.
- Alfarisie, Shendy. (2023). Konstruksi Pelecehan Seksual Pada Film (Analisis Framing pada Film Penyalin Cahaya dan Disclosure)". *SKRIPSI tidak diterbitkan*. Lampung: Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.
- Arifif, Sharifa dan Muhammad Syukron A. (2022). *Studi Semiotik Feminisme Pada Film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak (Analisis Semiotika Roland Barthes)*, Jurnal Indonesia Sosial Sains 3(2).
- Atiqi, Khairul. (2022). Analisis Semiotika Representasi Isu Sosial Dalam Film Dokumenter Netflix the Tinder Swindler. *SKRIPSI tidak diterbitkan*. Medan:

Jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Azizi, A. (2023). *Menyingkap Pesan Sosial di Balik Layar Film*", Himakom.
- Darma, Y. A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Yrama Widya.
- Desriawant, Sutikno. (2023). *Analisis Diskursif dalam Pernyataan Kontroversi Effendi Simbolon (Wacana Kritis Norman Fairclough) Pada Rapat Kerja Komisi 1 DPR dengan TNI di Bulan September 2022*, Jurnal Serunai Bahasa Indonesia 20(2), 1-23.
- Fahmi, Novrizal. (2021). Analisis Wacana Kritis Indikasi Praktik Oligarki dalam Film Sexy Killers. TESIS *tidak diterbitkan*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Faizah, Dwi F. (2022). Konstruksi Sosial Keagamaan Eks Lokalisasi Krian Di Dusun Purwoharjo Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. SKRIPSI *tidak diterbitkan*. Jawa Timur: Jurusan Agama-Agama IAIN Kediri.
- Fatikh, M. Alfin. (2019). *Komunikasi Citra Jokowi Pasca Viral #2019GantiPresiden*, Jurnal Al-Tsiqoh: Dakwah dan Ekonomi 4(1), 37.
- Fatmawati. (2021). *Kampanye Politik: Sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Fithrotulhaq, Aisyah. (2024). *Pemaknaan Bioskop Alternatif Sebagai Pembentuk Pola Konsumsi Film Alternatif*. SKRIPSI tidak diterbitkan. Surakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surakarta.
- Foucault, M. (1988). *The Foucauldian Concept of Power. Power/Knowledge*, 7–66.
- Gani, Amirsyah dan Reni N. (2019). *Representation Social Criticism In The Documentary Film of Behind a Frequency*. Jurnal Proceeding of Management 6(3), 9.
- Goran, W. K. (2021). *Representasi Komunikasi Politik Dalam Film Lantun Rakyat (Studi Semiotika John fiske Pada Film "LANTUN RAKYAT")*. SKRIPSI tidak diterbitkan.

- Gurning, S. T., Wiranegara, I., & Suminta, D. (2024). *Documentary Content in The Digital Era (Watchdoc Documentary Content Study)*. Metacommunication; Journal of Communication Studies, 9(1), 19.
<https://doi.org/10.20527/mc.v1i1.18761>
- Hairunnisa dan Wisda A. S. (2022). *Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan*. Jurnal of Government and Politics (JGOP) 4(1), 4.
- Indriyani, Asit Defi. (2022). Konstruksi Sosial Terhadap Kedudukan Nafkah Dari Istri Yang Bekerja Di Ponorogo. TESIS *tidak diterbitkan*. Jawa Timur: Pascasarjana IAIN Ponorogo.
- Mawarni, Iga S. dan Andi A. (2021). *Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Sembra' di Era Globalisasi*. Jurnal Of Sociology Education Review 1(2), 4-6.
- Mulyana. (2005). *Kajian Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pamuji, Widi Hari. (2020). Penulisan Skenario dalam Pembuatan Film Pendek bergenre Drama dengan Tema Gangguan Kesehatan Mental yang Berupa "Self-Harm". SKRIPSI *tidak diterbitkan*. Surabaya: Jurusan DIV Produksi Film dan Televisi Universitas Dinamika.
- Pohan, Z. R. H. (2018). *Titik Analisis Marx dan Foucault pada Kuasa dan Jalan Penindasan atas Kematian Tuhan*.
- Pranata, Gustin. (2022). Konstruksi Media Online Pedoman Bengkulu Dalam Pemberitaan Senator. SKRIPSI *tidak diterbitkan*. Bengkulu: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Curup.
- Pureklolon, Thomas. (2020). *Komunikasi Politik: Kajian Substansial Dalam Pendekatan Politik*, Jurnal Visi Komunikasi 19(2), 207.
- Ramadhani, Muhammad M. dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Bandung.

- Rambe, Halimah T. dan Syahrul A. (2022). Analisis Semiotika Film Negeri di Bawah Kabut Semiotics Analysis of Film The Land Beneath The Fog". *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan diri* 2(4) 991.
- Rosddale, C., & Stierl, M. (2016). *Everything is dangerous: Conduct and counter-conduct in the occupy movement*. Global Society, 30(2), 157–178.
<https://doi.org/10.1080/13600826.2015.1133569>
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sari, Junita Dwi Puspita, (2021). *Tradisi Tumpek Kandang untuk Menjelaskan Ikatan Manusia dengan Binatang dalam Penyutradaraan Film Dokumenter "Palemanahan"*. SKRIPSI tidak diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Film dan Televisi Institut Seni Indonesia
- Setiawan, Muh Farhan S, dkk. (2024). *Analisis Peran Komunikasi Politik Dalam Pencitraan Calon Pemimpin Pada Kontestan Pemilu*, Jurnal: Ilmiah Multidisiplin 3(3), 108-117.
- Sheridan, A. (1976). *Michel Foucault Discipline and Punish*. In *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Siregar, M. (2021). *Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–12.
<https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>
- Soelistyowati, Rr Dinar. (2019). *Analisis Netralitas Media Televisi dalam Debat Pilpres 2019*, *Jurnal Komunikasi Akrab* 4(2), 118-121.
- Stollery, M. (2017). *John Grierson's "First Principles" as Origin and Beginning: The Emergence of the Documentary Tradition in the Field of Nonfiction Film*, *Screen*, 58(3), 309-331. <https://doi.org/10.1093/screen/hjx027>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.